BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

MS V Tahun Sidang 2021-2022
(28 Juni – 11 Juli 2022)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

18/07/22

DAFTAR ISI

KOMISI II **1**

A. FUNGSI LEGISLASI 1
B. FUNGSI ANGGARAN 4
C. FUNGSI PENGAWASAN 4
D. TUGAS KHUSUS 6

KOMISI III **7**

A. FUNGSI LEGISLASI 7
B. FUNGSI ANGGARAN 11
C. FUNGSI PENGAWASAN 11
D. TUGAS KHUSUS 13

KOMISI IV **16**

A. FUNGSI LEGISLASI 16
B. FUNGSI ANGGARAN 16
C. FUNGSI PENGAWASAN 16

KOMISI V **19**

A. FUNGSI LEGISLASI 19
B. FUNGSI ANGGARAN 19
C. FUNGSI PENGAWASAN 20

KOMISI VI **22**

D. FUNGSI LEGISLASI 22
E. FUNGSI ANGGARAN 22
F. FUNGSI PENGAWASAN 22

KOMISI VII **32**

A. FUNGSI LEGISLASI 32
B. FUNGSI ANGGARAN 32
C. FUNGSI PENGAWASAN 32

KOMISI VIII **35**

A. FUNGSI LEGISLASI 35
B. FUNGSI ANGGARAN 35
C. FUNGSI PENGAWASAN 35

KOMISI IX **38**

A. FUNGSI LEGISLASI 38
B. FUNGSI ANGGARAN 38
C. FUNGSI PENGAWASAN 38

KOMISI X **54**

A. FUNGSI LEGISLASI 54
B. FUNGSI ANGGARAN 54
C. FUNGSI PENGAWASAN 55

BADAN LEGISLASI **57**

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN **58**

BADAN ANGGARAN **74**

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA **78**

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN **79**

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA **80**

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua, yaitu: Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan**	a. Penyusunan b. Pembahasan c. *Harmonisasi;* d. *Prolegnas;* e. *Pemantauan & peninjauan*	Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda laporan Panja 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, dan penandatanganan peta wilayah.	Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	**3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua, yaitu: Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan**	a. Penyusunan b. Pembahasan *c. Harmonisasi;* *d. Prolegnas;* *e. Pemantauan & peninjauan*	Raker/RDP Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri, LAN, dan BKN, dengan agenda membicarakan tentang pengisian formasi ASN di 3 (tiga) Provinsi hasil pemekaran di Provinsi Papua.	1. Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati pengisian Pasal 21 pada draft RUU di 3 (tiga) daerah provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Bunyi pasal yang disepakati yaitu: Pasal 21 (1) Ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi. (2) Untuk pertama kalinya pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan dapat dilakukan dengan penerimaan: a. calon pegawai negeri sipil orang asli Papua yang berusia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun; b. pegawai honorer orang asli papua yang terdaftar kategori II di Badan Kepegawaian Negara menjadi calon pegawai

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				negeri sipil yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
3.	**RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya**	a. Penyusunan b. Pembahasan *c. Harmonisasi;* *d. Prolegnas;* e. *Pemantauan & peninjauan*		RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada Rapat Paripurna DPR RI diputuskan menjadi RUU Usul DPR RI.
4.	**7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi tentang Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah**	a. Penyusunan b. Pembahasan *c. Harmonisasi;* *d. Prolegnas;* *e. Pemantauan & peninjauan*	Rapat Intern Komisi II DPR RI, dengan agenda persetujuan Komisi II DPR RI atas 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jatim, Provinsi Jateng, Provinsi Jabar, Provinsi Maluku dan Provinsi Kalteng) untuk dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi di Badan Legislasi DPR RI	Terkait 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi tentang Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi II DPR RI menyetujui draf RUU tersebut untuk dikirim ke Badan Legislasi DPR RI guna dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Kanwil BPN NTB, Kalimantan Tengah, dan Jambi**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja panja mafia pertanahan, HGU, HGB, HPL, dan Tata Ruang ke Kanwil BPN NTB, Kalimantan Tengah, dan Jambi	
2.	**Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan KPU	1. Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Komisi II DPR RI meminta KPU untuk menggunakan data Administrasi Kependudukan dan data Desa/Kelurahan serta Kecamatan yang terbaru berasal dari Kemendagri termasuk di 3 (tiga) Provinsi baru hasil

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				pemekaran di Papua sebagai basis data utama dalam melakukan verifikasi keanggotaan serta Kepengurusan Partai Politik calon peserta pemilihan umum. 3. Komisi II DPR RI meminta KPU agar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat menjamin sistem keamanan data dan perlindungan data pribadi dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum. 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi II DPR RI meminta KPU agar tidak hanya memberikan akses pembacaan data SIPOL kepada Bawaslu, tetapi KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu.
3.	**Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan Provinsi Bali**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan	Melakukan kunjungan kerja pada Reses Masa Persidangam V Tahun Sidang	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	2021-2022 ke Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan Provinsi Bali	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**DKPP RI**	a. Mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas keputusan berdasarkan mufakat; b. Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar; c. Persetujuan pemindahtanganan aset negara; d. Persetujuan perjanjian internasional yang berdampak luas; e. Pemilihan anggota BPK; f. Penegakan kode etik; g. Kerja sama antar parlemen; h. Akuntabilitas keuangan; i. Kerumahtanggaan DPR RI; j. Lain-lain.		

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan *RUU tentang HAPER)***	FGD (*Focus Group Discussion)*	Pada tanggal 4 Juli 2022 Komisi III DPR RI melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata Sambutan sekaligus membuka FGD: Ketua Panja RUU tentang Haper, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. Narasumber : 1. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, diwakilkan oleh Hakim Agung MA RI, YM Syamsul Maarif, SH, LL.M, PhD. 2. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, S.H., M.H. C.N. 3. Dr. Asep Iwan Iriawan, SH, MH. Moderator : Afdhal Mahatta, S.H., M.H. Peserta: 1. Fungsional Badan Keahlian DPR RI 2. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 3. Kongres Advokat Indonesia (KAI) 4. Ikatan Notaris Indonesia (INI) 5. Sekretariat TA Komisi dan TA Fraksi Komisi III	---
2.	**Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35**	Rapat Dengar Pendapat Umum	A. Pada tanggal 30 Juni 2022, Panja RUU tentang Narkotika mengadakan RDPU dengan Santi Warastuti didampingi oleh Singgih Tomi Gumilang dan Yayasan Sativa Nusantara (Prof.	--

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan *RUU tentang Narkotika)*	FGD (*Focus Group Discussion)*	Musri Musman), membahas mengenai legalisasi ganja medis. B. Komisi III DPR RI melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada tanggal 5 Juli 2022 Sambutan : Ketua Panja RUU tentang Narkotika, Bp Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM. Narasumber : 1. Kepala BNN RI, diwakilkan oleh Direktur Hukum/Plt. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Susanto, SH, MH. 2. Kabareskrim Polri, diwakilkan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Krisno H. Siregar. 3. Dr. Asmin Fransiska, SH, LLM. Moderator : Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. Peserta: 1. Anggota Panja RUU Narkotika Komisi III DPR RI 2. Badan Narkotika Nasional/Provinsi 3. Bareskrim Polri 4. Kejaksaan RI 5. Kementerian Hukum dan HAM RI 6. Mahkamah Agung RI 7. Organisasi Masyarakat terkait dengan Hukum Pidana dan Kejahatan Narkotika: ICJR, FOKAN, GMDM, JRKN dan pihak terkait lainnya	--

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	**Pembahasan RUU Operan (*RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan*)**	Rapat Kerja	Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM tanggal 25 Mei 2022, Komisi III DPR RI mengirim surat kepada Presiden melalui Pimpinan DPR RI Nomor B/11302/LG.02.02/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal.Penyelesaian RUU Operan (*Carry over).* Atas dasar surat Komisi III tersebut, Pimpinan DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor B/12403/PW.11.01/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Penyelesaian Pembahasan RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan oleh Komisi III DPR RI. Pada tanggal 6 Juli 2022 Komisi III mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta tenaga ahli pemerintah, membahas mengenai penyelesaian pembahasan RUU operan dan penyerahan penjelasan 14 issue krusial dalam RUU tentang KUHP dari Pemerintah kepada Komisi III DPR RI. Kesimpulan: 1. Komisi III DPR RI menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang telah disempurnakan.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Komisi III DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan. 3. Komisi III DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan untuk diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.	
		Rapat Intern	Setelah melaksanakan rapat kerja, Komisi III mengadakan Rapat Intern untuk menindaklanjuti kesimpulan raker terkait dengan pembahasan RUU tentang Pemasyarakatan.	
		Rapat Kerja Tk. I	Pembahasan Pengambilan Keputusan Tingkat I atas RUU tentang Pemasyarakatan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2022 pkl. 16.00 WIB dengan agenda pendapat mini fraksi-fraksi, pengambilan Keputusan dilanjutkan dengan penandatanganan draf RUU tentang Pemasyarakatan oleh Pimpinan dan Perwakilan Fraksi serta Pemerintah. Raker dihadiri oleh Menkumham dan Menpan RB ad	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			interim dalam hal ini diwakilkan oleh Wamenkumham.	
		Rapat Paripurna	Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2022 dengan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II atas RUU tentang Pemasyarakatan, memutuskan bahwa DPR RI menyetujui RUU tentang Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Panja Pengawasan Penegakan Hukum**	Rapat Dengar Pendapat	1. RDP dihadiri oleh Jampidum Kejaksaan RI dan Kabareskrim Mabes Polri 2. Membahas permasalahan kasus PT. Bank Mandiri, Tbk. 3. Rapat bersifat **TERTUTUP** dan diakhir rapat Komisi III memberikan beberapa rekomendasi.	1. Rapat Panja Pengawasan Penegakan hukum dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	**Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**	Rapat Kerja	1. Raker dihadiri oleh Pimpinan KPK beserta jajaran. 2. Membahas mengenai Evaluasi kinerja KPK Tahun 2021 & Semester 1 Tahun 2022. 3. Rapat bersifat **TERTUTUP.**	1. Raker dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022. 2. Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Bambang Wuryanto, MBA.
3.	1. **Kedutaan Besar RI untuk Republik Portugal** 2. ***Parlemen Portugal Assembly of the Portuguese Republic* (*Assembleia da República*)** 3. ***Commission for the Dissuasion of Drug Addict* (*Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência – CDT*** 4. **Kepolisian *(The Polícia de Segurança Pública (Public Security Police))*** 5. **Kejaksaan *(Ministério Público)***	Kunjungan Kerja Luar Negeri	1. Komisi III DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Republik Portugal pada tanggal 10 s.d. 16 Juni 2022. 2. Dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya.	---

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	1. **Kepala Kepolsian Daerah** 2. **Kepala Kejaksaan Tinggi** 3. **Kepala BNN Provinsi** 4. **Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham** 5. **Ketua Pengadilan Tinggi** 6. **Ketua Pengadilan Tinggi Agama** 7. **Ketua Pengadilan TUN** 8. **Ketua Pengadilan Tinggi Militer**	Kunker Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022	Kunjungan Kerja Reses Komisi III ke 3 (tiga) daerah, yaitu : a. Provinsi NTB, tanggal 20 s.d. 24 Juli 2022 b. Provinsi Bengkulu, tanggal 8 s.d. 12 Agustus 2022 c. Provinsi Jambi, tanggal 8 s.d. 12 Agustus 2022	---

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Calon Hakim Agung** : 1. F. Willem Saija, S.H., M.H., (Kamar Pidana). 2. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum, (Kamar Pidana). 3. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum., (Kamar Pidana).	Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test)*	1. Berdasarkan Keputusan Rapat Bamus tanggal 23 Juni 2022 dan dituangkan ke dalam surat Pimpinan DPR RI Nomor T/712/PW.02/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 Hal : Penugasan untuk membahas Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, Komisi III DPR RI mendapat penugasan untuk melakukan pembahasan	---

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	4. Suradi, S.H., S.Sos., M.H., (Kamar Pidana). 5. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., (Kamar Perdata). 6. Dr. Abd. Hakim, M.H.I., (Kamar Agama). 7. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., (Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak). 8. Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., CA., M.M., M.Hum., (Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak). **<u>Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung</u>**: 1. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. 2. H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. 3. Sdr. Rodjai S. Irawan, S.H., M.M.		pemberian persetujuan 8 (delapan) Calon Hakim Agung dan 3 (tiga) orang Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung. 2. Atas dasar Keputusan Bamus dan surat Pimpinan DPR RI tersebut, Komisi III melakukan beberapa rangkaian kegiatan uji kelayakan (*fit and proper test)* Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, sebagai berikut: a. Publikasi di media massa (Kompas dan Media Indonesia) telah dilaksanakan pada hari Jumat sd Sabtu tanggal 24 s.d. 25 Juni 2022. b. Kegiatan Uji Kelayakan (*fit and proper test)* Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung diawali dengan pengambilan nomor urut dan pengambilan judul makalah serta pembuatan makalah tanggal 27 Juni 2022. c. Berdasarkan nomor urut yang telah diambil oleh para Calon, maka Uji Kelayakan dimulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 5 tanggal 28 Juni 2022, dan nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 11 tanggal 29 Juni 2022. d. Tanggal 29 Juni 2022 pkl. 19.00 WIB Rapat Pleno dalam rangka pengambilan keputusan. setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi, maka Komisi III memutuskan Menyetujui Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., sebagai Calon Hakim Agung	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak, Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. sebagai Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, dan H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung. 3. Pada tanggal 30 Juni 2022 Rapat Paripurna memutuskan bahwa DPR RI menyetujui : a. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata; b. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak; c. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. sebagai Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor;, d. H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. sebagai Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung; dan akan diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**	Rapat Pleno Harmonisasi RUU KSDAHE di Badan Legislasi DPR RI.	Pengambilan Keputusan.	Menyepakati RUU KSDAHE diajukan dalam Rapat Paripurna terdekat untuk ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI.
2.	**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**	Rapat Paripurna DPR RI.	Pengambilan Keputusan.	Menyepakati RUU KSDAHE ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. **Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara;	RDPU Panja Komisi IV DPR Mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membahas:	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	b. **Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)**	c. Kebijakan Pemerintah.	a. Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan untuk Kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Operasional Industri, serta Kegiatan Pertambangan dan Migas Berdampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; serta c. Pengawasan Atas Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan.	
2.	**Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL-TBPPD) Jawa Barat**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Audiensi menyampaikan Aspirasi dan Masukan Terkait Pengembangan Sektor Pertanian dan Status Penyuluh Pertanian.	
3.	**DPRD Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Audiensi membahas Jatuhnya Harga Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Tingkat Petani.	
4.	**DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Audiensi membahas Jatuhnya Harga Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Tingkat Petani.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3 Eselon 1)**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	RDP Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, membahas Alternatif Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.	
6.	a. **Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)** b. **Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	RDPU Panja Komisi IV DPR mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota, membahas: a. Pengelolaan lingkungan hidup pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; b. Pelaksanaan pemberian izin lingkungan untuk kegiatan operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, serta kegiatan pertambangan dan migas berdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta c. Pengawasan atas kewajiban pemegang izin lingkungan.	
7.	**DPRD Provinsi Sumatera Selatan**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Audiensi membahas Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	Rapat Dengar Pendapat (Terbuka)	- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Mei 2022; - Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I.	- RDP dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 15.50 - 17.15 WIB secara Fisik dan Virtual. - RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp. Roberth Rouw - Dihadiri oleh 1. Dirjen Cipta Karya; 2. Dirjen Perumahan; beserta jajaran KemenPUPR.
2.	**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	Rapat Dengar Pendapat (Terbuka)	- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Mei 2022; - Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I.	- RDP dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 15.15 - 16.50 Wib secara Fisik dan Virtual. - RDP dipimpin oleh Ketua Komisi V Bp. Lasarus - Dihadiri oleh 1. Dirjen Bina Marga; 2. Dirjen Bina Konstruksi; beserta jajaran KemenPUPR.
3.	**Kementerian Pekerjaan Umum**	Rapat Dengar Pendapat	- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Mei 2022;	- RDP dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2022 pukul 10.05 - 13.15 Wib secara Fisik dan Virtual.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	dan Perumahan Rakyat	(Terbuka)	- Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I.	- RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Bp. Andi Iwan Darmawan Aras. - Dihadiri oleh 1. Dirjen SDA; 2. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; beserta jajaran KemenPUPR.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	- **Ditjen Perhubungan Udara - Kemenhub** - **LPPNPI (AIRNAV)**	–	RDP dengan Dirjen Perhubungan Udara dan AIRNAV membahas tentang keselamatan penerbangan dan laik udara pesawat-pesawat, kebijakan tarif pesawat dn penganganan *ground hanndling*, subsidi bidan angkutan udara serta kesiapan navigasi udara seluruh Indonesia.	RDP dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 secara Fisik dan Virtual.
2.	- **Ditjen Perhubungan Darat** - **BPTJ - Kemenhub**	–	RDP dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala BPTJ membahas tentang evaluasi penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan, jembatan timbang, subsidi bidang angkutan darat dan konektivitas transportasi di JABODETABEK.	RDP dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022 secara Fisik dan Virtual

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	- **Kementrian PUPR** - **Kementrian Perhubungan**	Kunjungan Spesifik	Meninjau: 1. Pengembangan Bandara Komodo - Labuan Bajo, NTT (dalam rangka kesiapan menyambut kegiatan G20) 2. Lokasi Rencana Pengembangan Bendungan Mujur - Lombok Tengan, NTB 3. Infrastruktur dan transportasi pasca abrasi di Pantai Amurang - Minahasa Selatan, Sulut	Kunsfik dilaksanakan tanggal 30 Juni sd 02 Juli 2022.
4	**Ditjen Perhubungan Laut - Kemenhub**	–	RDP dengan Dirjen Perhubungan Laut membahas tentang evaluasi Tol laut, Subsidi Bidang Transportasi Laut, Konektivitas Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Pengumpul.	RDP dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2022 secara Fisik dan Virtual.
5.	**Ditjen Perkeretaapian-Kemenhub**	–	RDP dengan Dirjen Perkeretaapian membahas tentang Jaringan Kereta Api seluruh Indonesia, Pengembangan Teknologi Kereta Api dan Pemenuhan SPM Perkeretaapian.	RDP dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2022 secara Fisik dan Virtual.
6.	- **Kementrian PUPR** - **Kementrian Perhubungan**	Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI (Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022)	Kunjungan ke : 1. Ternate, Provinsi Maluku Utara 2. Jayapura, Provinsi Papua 3. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	KunKer Reses dilaksanakan tanggal 08 sd 15 Juli 2022

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Deputi Bidang Sdm Teknologi Dan Informasi Kementerian BUMN** **Ketua Umum Forum *Human Capital* Indonesia**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI memahami penjelasan dari Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi (SDMTI) Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum Forum *Human Capital* Indonesia (FHCI) terkait pelaksanaan rekrutmen bersama pegawai BUMN di Tahun 2022, serta mendukung Program Rekrutmen Bersama BUMN dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja nasional. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI agar memastikan independensi, profesionalisme, dan *good corporate governance* dalam proses Rekrutmen Bersama BUMN, secara khusus pada seleksi tahap III BUMN; Mendorong FHCI untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam setiap tahapan Rekrutmen Bersama BUMN, termasuk melalui optimalisasi teknologi informasi; Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi talenta-talenta terbaik di	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum Forum *Human Capital* Indonesia. Selasa, 28 Juni 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			seluruh Indonesia untuk bergabung ke BUMN baik sebagai pekerja maupun pimpinan. Mendorong kebijakan afirmatif terkait kewilayahan (terkait daerah 3T), gender perempuan dan disabilitas. Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI meminta kepada Deputi SDMTI Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum FHCI untuk melaporkan hasil evaluasi rekrutmen bersama pegawai BUMN tahun 2022. Komisi VI DPR RI meminta kepada Deputi SDMTI Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum FHCI untuk memastikan hasil rekrutmen bersama pegawai BUMN tahun 2022 memiliki spirit Pancasila sebagai penggerak budaya korporasi *modern*.	
2.	**Perum Perhutani**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Komisi VI DPR RI memahami penjelasan terkait pencapaian kinerja Perum Perhutani tahun 2021 serta mendorong Perum Perhutani untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar target yang ditetapkan untuk tahun 2022 dan periode-periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Perhutani beserta anggota *holding* untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: • melaksanakan inovasi-inovasi usaha termasuk transformasi teknologi dan digital serta pemanfaatan data untuk tujuan yang bersifat prediktif sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas usaha	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perhutani Rabu, 29 Juni 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dengan tetap memperhatikan pengembangan berwawasan lingkungan. • meningkatkan peran dan fungsi dalam mendukung kelestarian hutan nasional termasuk kontribusi pada perekonomian setempat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan UMKM setempat dalam kegiatan usaha perusahaan. • meningkatkan sinergi dengan BUMN-BUMN di bidang perkebunan dan pangan yaitu PT Perkebunan Nusantara *Group* dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID *Food* untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan kehutanan nasional serta mewujudkan ketahanan pangan nasional. • melakukan percepatan intergrasi bisnis dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kinerja perusahaan. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan status dan luas kawasan yang dikelola oleh Perusahaan dalam rangka mencegah pengambilalihan kawasan yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani untuk menyusun strategi mitigasi risiko terkait implementasi kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dalam rangka meminimalisasi dampak kebijakan	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tersebut terhadap kinerja perusahaan. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani beserta anggota *holding* untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh kawasan hutan yang dikelola untuk mencegah terjadinya *ilegal logging*, transaksi usaha yang tidak transparan serta tindak kejahatan lainnya yang berdampak negatif bagi kinerja perusahaan.	
3.	**PT Hutama Karya (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., terkait dengan rencana *Right Issue* SIG sebagai implementasi kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan integrasi BUMN Sub klaster Semen demi penguatan BUMN dalam Persaingan industri semen, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., terkait dengan penjualan saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp2.980.000.000.000 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*) dari cadangan pembiayaan investasi, Plh. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, terkait dengan penjualan saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode *Right Issue* yang akan digunakan untuk pembayaran utang dan pengembangan usaha. Plh. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, terkait dengan penjualan saham	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Plh. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Plh. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Direktur Utama

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			jenis Saham dalam Portepel dengan metode *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022, Konversi utang Obligasi Wajib Konversi sebesar Rp1 triliun oleh Pemerintah dan Konversi hutang menjadi saham dari nilai *Claim Settlement* Kreditur, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan Direktur Utama PT Semen Kupang, terkait dengan penjualan Saham Pemerintah dengan metode Privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor dan akan memutuskan persetujuan rencana aksi korporasi perusahaan BUMN dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI. Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, untuk melakukan perbaikan dan *monitoring* secara ketat terkait restrukturisasi perusahaan yang dibiayai oleh dana yang bersumber dari *Right Issue* perusahaan termasuk di dalamnya Penyertaan Modal Negara sehingga proses bisnis beserta anak perusahaan dapat berjalan dengan baik. Komisi VI DPR RI juga turut meminta PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Semen Kupang untuk memperhatikan risiko, mitigasi, tahapan dan *timeline* privatisasi yang akan dilakukan agar dapat mencapai target yang ditetapkan.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT Semen Kupang, Kamis, 30 Juni 2022.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	**Kementerian BUMN**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara Tunai dan Non Tunai Tahun 2023, serta menyetujui inisiatif *Corporate Action* untuk BUMN. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperhatikan seluruh catatan/pandangan Fraksi-Fraksi di Komisi VI DPR RI terkait dengan persetujuan PMN Tahun 2023 dan inisiatif *Corporate Action* tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini. Jika dalam proses pengajuan usulan PMN Tahun 2023 dalam RAPBN TA 2023, terdapat perbedaan terkait nilai dana, tujuan penggunaan dan/atau entitas BUMN dengan yang diputuskan di Komisi XI DPR RI dan/atau Badan Anggaran maka Kementerian BUMN RI segera menyampaikan hal-hal tersebut kepada Komisi VI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan kembali atas perbedaan tersebut.	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI Senin, 4 Juli 2022
5.	**RDPU Dengan GEMPUR NET 89**	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net 89 (Gempur Net 89) terkait permasalahan investasi *robot trading* yang dihadapi oleh member Net 89. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net 89 (Gempur Net 89) akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Komisi VI DPR RI untuk disampaikan pada saat rapat selanjutnya dengan Badan Pegawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan dan Lembaga terkait.	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net 89 (Gempur Net 89) Selasa, 5 Juli 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	**Kementerian Perdagangan RI**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan *Regional Comprehensinve Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea*). Komisi VI DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan *Regional Comprehensinve Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea*), dalam pembahasan tersebut terhadap RUU tentang Pengesahan *Regional*	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI Selasa, 5 Juli 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Comprehensinve Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea*) dari ketentuan menimbang, mengingat, menetapkan dan DIM terkait dengan Pasal RUU yang terdiri dari 2 Pasal, seluruh Fraksi menyepakati dengan tidak ada perubahan (Tetap). Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Regional *Comprehensinve Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea*), Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan *Regional Comprehensinve Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-Undang.	
7.	**PT. Pertamina (Persero)** **PT. Kilang Pertamina Internasional** **PT. Pertamina Hulu Energi** **PT. Pertamina Patra Niaga**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI telah mendengar penjelasan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga ketahanan energi dengan meningkatkan produksi, pemeliharaan fasilitas, optimasi biaya dan digitalisasi. Tidak hanya itu, Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT Pertamina (Persero) dalam melakukan penyaluran produk subsidi agar tidak *over* kuota dengan menetapkan segmen pengguna BBM subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), Optimalisasi digitalisasi SPBU dengan menggunakan sistem pendaftaran pengguna BBM JBT- JBKP dan LPG subsidi melalui *platform* MyPertamina, *Website* Pertamina atau pendaftaran langsung di SPBU, pengawasan dan pengamanan bersama instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Instansi/lembaga lainnya, ketersediaan *outlet* produk non subsidi dan program marketing dan komunikasi.	Rapat Dengar Pendapat Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Direktur Utama PT. Kilang Pertamina Internasional, Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energi, dan Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) untuk memperjuangkan agar Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dapat juga disalurkan melalui *Pertashop*.	Rabu, 6 Juli 2022

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Peran serta AGRI terhadap penguatan Industri Kecil dan Menengah	
2.	**Kunjungan Kerja Spesifik**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Kunjungan PT SMART, Tbk di Belawan Provinsi Sumatera Utara b. Kunjungan PT Djarum Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah c. Kunjungan Ke PLTU Barru di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan	
3.	**Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK)**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Terkait Masalah IUP Batubara di Provinsi Kalimantan Timur	
4.	**Ketua Umum Forum Pemilik Hak Sulung**	a. Pelaksanaan undang-undang;	Terkait Hak Adat pada Wilayah Kerja PT Freeport Indonesia	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.		
5.	**Staf Ahli Duta Besar Kerajaan Inggris** 1. **Neil McCulloch, *Expert Subsidy Reform United Kingdom*)** 2. **David Lutman, *Head of Low Carbon Energy Team*** 3. **Bagus Mudiantoro, *Policy Co-Director* Mentari** 4. **Atika Sari Fanani, *Energy Adviser***	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	*Courtesy Call*, terkait: a. Transisi Energi. b. Masukan mengenai RUU tentang EBT.	
6.	a. **Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI** b. **Dirut PT Vale Indonesia**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Penjelasan terkait tahapan-tahapan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK sebagai kelanjutan KK. b. Penjelasan terkait substansi *Illegal Mining.*	
7.	**Kunjungan Kerja**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	a. Kunjungan PT Wilmar dan Kawasan Industri Dumai, di Dumai Provinsi Riau.	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			b. Kunjungan PLTU Karangkandri di Cilacap Provinsi Jawa Tengah. c. Kunjungan Ke PT Amman Mineral Nusatenggara di Kabupaten Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Kunjungan Kerja Pengawasan ke Arab Saudi**	Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M di Arab Saudi dan di Kaltim, serta penyaluran bantuan sosial dan kesiapsiagaan bencana.	Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan Jemaah haji Indonesia yang berangkat haji dapat merasakan pelayanan, bimbingan dan perlindungan dari Pemerintah mulai berangkat dari Indonesia menuju Arab Saudi, selama berada di Arab Saudi hingga kembali ke Tanah Air dengan menyandang status haji yang mabrur/mabrurah.	-
2.	**Kunjungan Kerja Spesifik ke Yogyakarta (Prov DIY), Bandung (Jawa Barat) dan Lebak (Banten)**	Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial dan pengawasan terhadap perlindungan	1. Memastikan pelaksanaan program dan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		perempuan dan anak serta penyandang disabilitas.	ada kendala di lapangan dapat diatasi sesegera mungkin sehingga mencegah terjadinya *inclusion error* (kesalahan memasukan orang yang tidak berhak menerima) dan *exclusion error* (atau kesalahan karena tidak memasukan orang yang berhak menerima). 2. Memastikan pelaksanaan program dan anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan secara optimal, khususnya di era pandemi Covid-19 ketika angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. 3. Memastikan pelaksanaan program dan anggaran perlindungan terhadap penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga Pemerintah dapat menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tentang Penyandang Disabilitas, termasuk mendorong peningkatan peran Balai Rehabilitasi Sosial (Rehsos) dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan**	Konsinyering telah selesai membahas draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Tidak ada kegiatan Panja	Panja akan masuk dalam pembahasan Timus Timsin pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, untuk selanjutnya diserahkan ke Baleg untuk dilakukan harmonisasi sebelum ke tahap selanjutnya di Paripurna.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Korea Selatan**	1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kunjungan dan pertemuan di KBRI di Seoul	1. Perbandingan penempatan PMI dengan negara-negara ASEAN di Korea Selatan, Indonesia menduduki ranking 5 (lima) yang dinilai masih memiliki peluang	Tanggal 26 Juni – 2 Juli 2022

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui pertemuan dengan PMI dan Diaspora di Korea Selatan	penempatan yang sangat besar dibandingkan dengan pekerja asing dari Thailand dan Vietnam, dengan skema penempatan P to P dengan kategori visa kerja E7. Kategori pekerja dengan visa kerja ini merupakan pekerja dengan keahlian yang tinggi yang diharapkan dapat disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan RI dan dukungan dari BP2MI yang akan menyeleksi kualitas keahlian PMI. 2. Permasalahan moral PMI pada saat menjalankan pekerjaan membebani kualitas moral pekerja migran Indonesia yang lain, yang seringkali muncul akibat perbedaan budaya antara Korea Selatan dan Indonesia disamping tanggung jawab pribadi yang kurang memadai, seperti mengambil jalan pintas atau lari dari tanggung jawab	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dalam menyelesaikan masalah yang pada akhirnya dinilai sebagai kesalahan atau pelanggaran dalam bekerja. Akibatnya, penilaian terhadap sikap moral PMI tersebut berdampak dengan dijadikannya ukuran dalam penerimaan PMI selanjutnya, sehingga penerimaan PMI selanjutnya dikurangi jumlah penempatannya. 3. Untuk memenuhi permintaan penempatan PMI dengan skema P to P dengan visa kerja kategori E7 sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pekerjaan di Korea Selatan, Kementerian Ketenagakerjaan RI terus mengupayakan pemenuhannya. Demikian pula halnya dengan perluasan penempatan PMI dengan kategori visa kerja E9 yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas CPMI sesuai kebutuhan sehingga dapat	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			memenuhi visa kerja kategori E7. Diakui bahwa kendala utama yang dihadapi adalah permasalahan penguasaan Bahasa, yang sangat menentukan, terutama kepada PMI yang ditempatkan pada perusahaan manufaktur. Meski berbeda, khusus untuk bidang pekerjaan las bawah laut yang ditempatkan dengan keahlian tersendiri, diakui tidak memerlukan penguasaan Bahasa yang tinggi. 4. Diakui, menurut Kementerian Ketenagakerjaan RI, penempatan PMI pekerja las di bawah laut, yang dalam waktu dekat akan ditempatkan guna memenuhi permintaan 500 PMI pekerja las bawah laut dinyatakan sudah siap. Selain itu, dalam waktu dekat akan menyusul penempatan sejumlah 2.000 PMI lainnya. Terkait bahasa,	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pemerintah Indonesia mengusulkan kiranya faktor Bahasa, menjadi syarat yang tidak memberatkan bagi pekerja dibawah laut yang berbeda dengan syarat pekerja untuk *care giver* atau pekerja manufktur lainnya. Dalam negosiasinya, pemerintah menargetkan dapat memenuhi 70 persen kebutuhan pekerja las bawah laut di Korea Selatan. 5. Penempatan G to G selanjutnya, dinyatakan oleh BP2MI bahwa telah memberikan perizinan penempatan sesuai dengan perkembangan pemulihan pandemi Covid 19. sejak pembukaan penempatan PMI ke Korea Selatan. Diakui BP2MI akan segera ditempatan 300 CPMI sebagai bagian dari semangat penempatan paska pandemi Covid 19.	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	**Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Jepang**	1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kunjungan dan pertemuan di KBRI di Tokyo Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui pertemuan dengan pihak Kementerian Kesejahteraan, Parlemen dan Perusahaan terkait di Jepang	1. Hingga saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja dan menetap di Jepang semakin meningkat, termasuk pekerja migran Indonesia dan peserta magang. Terlebih dengan adanya program *Spesified Skilled Worker* (SSW) sejak tahun 2019, maka sudah pasti akan semakin bertambah jumlah PMI kita di Jepang. Namun disayangkan bahwa banyaknya PMI kita tidak diimbangi dengan kehadiran atase ketenagakerjaan di Jepang hingga saat ini. 2. Saat ini, jepang sedang diperhadapkan pada permasalahan kelangkaan tenaga kerja produktif. Masyarakat Jepang dikatakan sebagai masyarakat yang menua (*koreika shakai*), karena jumlah penduduk berusia tua yaitu 65 tahun keatas terus bertambah karena angka kelahiran sangat rendah diikuti dengan usia harapan hidup penduduk Jepang yang semakin panjang. Dengan demikian menjadi momentum peluang dan	Tanggal 26 Juni – 2 Juli 2022

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kesempatan Indonesia untuk memperluas lapangan kerja dengan memenuhi kebutuhan pekerja terutama pekerja pengasuh orang tua atau *Caregiver*. 3. Dalam pemenuhan kebutuhan pekerjanya, konstitusi Jepang mengatur tegas terhadap penempatan pekerja asing hanya melalui program magang dan tidak serta merta menjadi pekerja. Peserta magang diharapkan dapat bekerja atau menjadi wirausaha setelah mereka kembali ke tanah air. Oleh karena itu delegasi meminta agar Peserta magang dapat benar-benar menerapkan ilmu dari Jepang sehingga dapat digunakan setelah kembali ke tanah air. 4. Dengan keluarnya kebijakan SSW oleh pemerintah Jepang, ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia terlebih dengan adanya bonus demografi di tahun 2030 yang akan datang, dimana kita akan menghadapi kelebihan angkatan muda produktif, bagi	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			peserta magang yang telah selesai mengikuti magang, mereka bisa langsung menjadi pekerja formal di Jepang. 5. Tingginya angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di jaman milenial saat ini. jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, tentunya seperti angin segar yang diperoleh bagi pekerja Indonesia disana. 6. Di tahun 2019 lalu, *Spesified Skilled Worker* (SSW), yakni kerja sama untuk mengisi jabatan di sektor formal pada 14 sektor bagi TKA bagi 8 negara, dengan total kebutuhan sebanyak 345 ribu tenaga kerja dalam 5 tahun. Ini juga tentunya harus di response baik karena menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi jabatan tersebut. 7. Pandemi yang terjadi lebih dari 2 tahun lalu, tentunya berdampak bagi PMI kita termasuk pekerja magang yang akan ditempatkan di	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Jepang. Namun disisi lain, menjadi kesempatan bagi Indonesia mempersiapkan tenaga kerjanya sehingga dapat memenuhi kriteria pekerja yang dibutuhkan oleh Jepang. 8. Per Juni 2022 ini, pemerintah jepang kembali membuka pintu masuknya pekerja asing, AP2LN sebagai asosiasi yang berperan terhadap penempatan pekerja di Jepang sejak 2013, tentunya kami apresiasi karena telah membantu pemerintah dalam upaya perluasan lapangan kerja.	
3.	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan **Kementerian Kesehatan RI,** dan Rapat Dengar Pendapat dengan **Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta Direktur Utama BPJS Kesehatan**	1. Penjelasan tentang perubahan tarif *INA-CBGs* dan kapitasi dalam rangka implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK); 2. Penjelasan tentang peta jalan pemerataan infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka persiapan implementasi Kelas	1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN dan BPJS Kesehatan untuk melaporkan secara tertulis hasil uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) guna: i. mengevaluasi skema uji coba KRIS agar merepresentasikan proporsi keterwakilan rumah sakit dan peserta; ii. merumuskan regulasi yang menjadi payung hukum uji	Tanggal 4 Juli 2022

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Rawat Inap Standar (KRIS); 3. Penjelasan terkait implementasi kebijakan pelayanan obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Formularium Nasional (Fornas).	coba dan implementasi KRIS; dan iii. melakukan penyesuaian peta jalan implementasi KRIS. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan DJSN bersama BPJS Kesehatan mempersiapkan secara komprehensif kebijakan dan implementasi Kelas Rawat lnap Standar (KRIS) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyangkut hal-hal sebagai berikut: i. Tujuan, definisi dan kriteria KRIS yang jelas dan disepakati bersama; ii. Kesiapan rumah sakit melalui peta jalan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai indikator KRIS, termasuk kebutuhan pembiayaan dan sumber pembiayaannya; iii. Kajian dampak	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			implementasi KRIS terhadap pembiayaan, kualitas pelayanan kesehatan, tarif rumah sakit dan iuran peserta JKN yang tidak memberatkan masyarakat; dan iv. Sosialisasi konsep KRIS yang telah disepakati secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN dan BPJS Kesehatan untuk mempersiapkan penerapan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dengan memperbesar upaya *promotive*-preventif, serta menghitung detil tarif layanan kesehatan berdasarkan aktuaria dalam INA-CBGs serta tarif kapitasi berdasarkan risiko peserta dan kualitas layanan, agar dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kesehatan dan peraturan pelaksananya. 4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan perluasan akses dengan mengedepankan upaya kesetaraan layanan kesehatan bagi pasien penyakit katastropik di JKN, dengan menyediakan obat inovatif yang bermutu dan berkualitas di dalam Formularium Nasional. 5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera mencari inovasi pembiayaan sebagai salah satu solusi keterbatasan pembiayaan obat inovatif sehingga dapat memperluas akses bagi pasien, termasuk pasien kanker paru dan diabetes, untuk mendapatkan obat yang lebih baik dan berkualitas di dalam program JKN. 6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan pelayanan obat program JKN dengan jaminan ketersediaan obat	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			melalui penguatan e-katalog sektoral dan segera menetapkan acuan harga obat bagi pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan.	
4.	Audiensi Dengan: 1. **Paguyuban Nasional Pensiunan BRI** 2. **Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI)** 3. **Aliansi Masyarakat Tembakau** 4. **Forum Komunikasi Karyawan PT. Masterindo Jaya Abadi**	Komisi IX DPR RI menerima pengaduan dari Paguyuban Nasional Pensiunan BRI, KPPNI, Aliansi Masyarakat Tembakau dan Forum Komunikasi Karyawan PT. Masterindo Jaya Abadi.	1. Kasus Paguyuban Nasional Pensiunan BRI, perlu di tindaklanjuti perlu mengupayakan penyelesaian kekurangan pesangon AN. H. MUH. YUNUS AMBO Pada saat PHK karena Pensiun sebesar Rp. 337.498.000,- 2. Usulan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) agar mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder dan akademis, dan usulan pembentukan peradilan maritim (perlu melalui pembentukan undang-undang khusus) 3. Aliansi Masyarakat Tembakau mendorong perlindungan kerja terhadap peluang bekerja dalam industri yang sama dengan industri yang lain (saat ini, industri tembakau, banyak menghadapi hambatan yang diakibatkan dari ketentuan	Tanggal 5 Juli 2022

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tembakau sebagai zat adiktif). 4. Kasus Forum Komunikasi Karyawan PT. Masterindo Jaya Abadi perlu di tindaklanjuti dengan mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan.	
5.	Audiensi Dengan: ***Migrant Care***	Komisi IX DPR RI menerima aspirasi yang disampaikan oleh *Migrant Care* yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI dalam masa sidang yang akan datang	1. Kurangnya sosialisasi UU 18/2017, faktanya LTSA tidak berfungsi, maka menjadi lahan basah bagi calo untuk CPMI yang kurang memahami regulasi 2. Mandat *zero cost* sebuah terobosan yang bagus namun tidak berjalan, maka dimanfaatkan oleh sindikat untuk menjalankan operasi traffiking. Maka kehadiran Negara masih dipertanyakan. 3. Lahirnya UU Nomor 18 tahun 2017 yg telah berlaku selama 5 tahun, masih banyak menimbulkan masalah. Ini harusnya menjadi evaluasi Komisi 9 DPR RI. 4. Evaluasi penanganan pemulangan PMI unprosedural, negara hadir memberikan	Tanggal 5 Juli 2022

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perlindungan dengan memulangkan PMI unprosedural namun aktor agen belum tersentuh untuk diproses secara hukum. 5. Terlebih ketidakpastian pemulangan PMI unprosedural tanpa agen, bagaimanakah seharusnya negara hadir memberikan keadilan perlindungan. 6. Hingga saat ini, *migrant care* mencatat bahwa kasus PMI di Malaysia didominasi kasus unprosedural, diikuti kasus TPPO untuk kasus PMI di Luar Negeri, paling banyak terjadi di Saudi Arabia, irak dan libia. Namun tidak dapat dipastikan apakah kasus tersebut akibat pemberlakuan *one channel system* (sistem satu kanal atau kebijakan sebelumnya). 7. *Migrant care* merasa bahwa sistem penempatan PMI harusnya diserahkan kepada masing-masing PMI. tidak lagi perlu dilakukan *one channel system.*	

NO	INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			8. Perlindungan terhadap PMI yg di tahanan di penjara detensi Malaysia, perlu perhatian yang lebih, apakah benar-benar karena serangan jantung atau karena penyiksaan? 9. Perlunya Negara agar lebih fokus dalam mengembangkan sistem *G to G.*	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	**RUU tentang Praktik Psikologi**	30 Juni 2022 Raker dengan Mendikbudristek RI, Menkumham HAM RI, Mensos RI, dan Menkes RI	Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati Perubahan judul RUU dari RUU tentang Praktik Psikologi menjadi RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, dan sembilan fraksi di Komisi X DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk dilanjutkan dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI.	
2	**RUU tentang Kepariwisataan**	4 Juli 2022 RDP dengan Kepala Badan Keahlian Dewan	Penyerahan NA dan draf RUU Kepariwisataan kepada Komisi X DPR RI .	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI**	4 Juli 2022 Rapat Kerja ▪ Membahas pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif ▪ Membahas tindak lanjut Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik	Pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif *trend*nya positif, dengan indikasi antara lain: a. Performansi kunjungan wisman, dimana per 19 juni 2022 mencapai 603,358 kunjungan wisman; b. Ekspor Ekraf, dimana pada triwulan I tahun 2022 tumbuh sebesar 56.16%; c. Kontribusi ekspor Ekraf terhadap non-migas pada triwulan I tahun 2022 sebesar 13.20%; dan d. *Travel & Tourism Development Index* tahun 2022, dimana saat ini mencapai peringkat 32 dari 117 negara. Komisi X DPR RI mendukung upaya pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Kemenparekraf/ Baparekraf RI Dalam upaya penguatan Desa Wisata dan Kampung Tematik, Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk terus berkoordinasi dengan K/L terkait dan kolaborasi antar deputi agar pengelolaannya lebih optimal dan meminimalisasi terjadinya ego sektoral, serta perlu ditingkatkannya bimtek pendampingan.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2	**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI**	5 Juli 2022 RDP Panja Kebijakan Kurikulum dengan eselon I Kemendikbudristek RI (Kepala BSKAP, Dirjen GTK, Dirjen Pendidikan Vokasi, dan Dirjen PAUD Dikdas Dikmen)	Membahas evaluasi penerapan K13, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Prototipe. Membahas Desain perencanaan kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan.	
3		5 Juli 2022 Rapat Intern	Pembentukan Panja Pengawasan (Perguruan Tinggi Swasta).	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1	Badan Legislasi	1. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan atas hasil harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (tgl 29 Juni 2022, pukul 13.00 WIB).
		2. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Walikota Bekasi, Walikota Depok, dan Walikota Tangerang Selatan dalam rangka pemantauan dan peninjauan atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (tgl 30 Juni 2022, pukul 13.00 WIB).
		3. Menerima Audensi Paguyuban Korban UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (PAKU ITE) (tgl 5 Juli 2022, pukul 09.30 WIB).
		4. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan Gubernur Provinsi Bali dalam rangka pemantauan dan peninjauan atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (tgl 5 Juli 2022, pukul 13.00 WIB).

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**KSB - BKSAP**	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Inggris Raya	GKSB DPR RI - Parlemen Inggris Raya mengadakan rapat internal untuk membahas rencana program kerja GKSB DPR RI-Parlemen Inggris Raya (28/06/22). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Inggris, Adisatrya Suryo Sulistio (F-PDIP), yang dihadiri secara fisik oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Inggris, Darmadi Durianto (F-PDIP) dan Lucy Kurniasari (F-PD). Rapat internal juga dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Inggris Raya, Melchias Markus Mekeng (F-PG), Achmad Muzani (F-PGerindra), Novita Wijayanti (F-PGerindra), Eva Yuliana (F-PNasdem) dan Farah Puteri Nahlia (F-PAN) secara virtual. Dalam rapat tersebut, Ketua dan Anggota GKSB memberi usulan agar pertemuan pada rangkaian kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Inggris Raya untuk berfokus pada kesehatan (penanggulangan pandemi), ekonomi dan bisnis, infrastruktur, serta kerja sama antar parlemen. Ketua rapat juga mengarahkan agar GKSB DPR RI - Parlemen Inggris Raya mengagendakan *courtesy call* dengan Dubes Inggris untuk Indonesia dan rapat virtual dengan Dubes RI di London untuk membahas rencana kunjungan, rangkaian pertemuan serta *pending matters* terkait isu terkini hubungan bilateral kedua negara.	28 Juni 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	**KSB - BKSAP**	Rapat Internal GKSB DPR RI – Kanada	GKSB DPR RI - Parlemen Kanada mengadakan rapat internal secara virtual untuk membahas rencana program kerja GKSB DPR RI-Parlemen Kanada (28/06/22). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Kanada, Sari Yuliati (F-PG), yang dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Kanada, Junimart Girsang (F-PDIP), Nusron Wahid (F-PG), Ardhya Pratiwi (F-PGerindra). Dalam rapat tersebut, Ketua dan Anggota GKSB memberi usulan agar pertemuan pada rangkaian kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Kanada untuk berfokus pada kerja sama kesehatan (khususnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19, kerja sama vaksin dan alat kesehatan), *cyber security*, *climate change*, pariwisata serta kerja sama antar parlemen. Ketua rapat juga mengarahkan agar GKSB DPR RI - Parlemen Kanada mengagendakan rapat dengan Kemlu RI dan *courtesy call* dengan Dubes Kanada untuk Indonesia untuk membahas rencana kunjungan, rangkaian pertemuan serta *pending matters* terkait isu terkini hubungan bilateral kedua negara.	28 Juni 2022
3.	**KSI - BKSAP**	"*Parliament's role in strengthening health security preparedness: the International Health Regulations" Global Health Security* 2022 di Singapura	Anggota BKSAP sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI, Krisdayanti (F PDIP) menjadi salah satu pembicara dalam salah satu sesi acara "*Global Health Security 2022*" Pada Jumat 29 Juni 2022, di Singapura.	29 Juni 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	**KSR - BKSAP**	Sidang Baku *Conference for the Non-Aligned Movement Parliamentary Network*	Wakil Ketua BKSAP, Dr Mardani Ali Sera, M. Eng. (F-PKS), dan Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) didampingi Anggota BKSAP, Ir. Hugua (F-PDIP) , Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si (FP-Gerindra), dan Ir. Fathan (F-PKB) menghadiri Sidang Baku *Conference for the Non-Aligned Movement Parliamentary Network* atau Sidang Parlemen Gerakan Non-Blok di Baku - Azerbaijan pada 29 Juni 2022 - 3 Juli 2022. Dalam Sidang itu, Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng. (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP selaku Ketua Delegasi menyampaikan *statement* yang menegaskan posisi Indonesia mendukung pembentukan Parlemen Gerakan Non Blok ini dan Prinsip Dasa Sila Bandung serta prinsip konsensus harus menjadi dasar pondasi pembentukan organisasi parlemen ini. Indonesia juga mengusulkan agar dibentuk Komisi Anggota Parlemen Muda (*young parliamentarians*) sebagai agen penerus yang akan berjuang untuk kemajuan organisasi ini. Di sela-sela persidangan, Delegasi DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Cuba dan Delegasi Iran yang keduanya menegaskan posisinya mendukung prinsip konsensus, dan Pertemuan bilateral dengan Delegasi Azerbaijan untuk diundang sebagai *Guest of the Host* pada Sidang P20 di Jakarta. Selain itu, Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan jajaran KBRI dan masyarakat Indonesia di Baku.	29 Juni – 3 Juli 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Sidang Parlemen Gerakan Non-Blok ini baru pertama kali diselenggarakan dan dihadiri oleh 37 parlemen dari 120 negara Anggota Gerakan Non-Blok. Sidang berhasil mengadopsi Baku Statuta, Baku *Declaration* dan Bendera serta logo organisasi. Sidang Kedua Parlemen Gerakan Non-Blok akan diselenggarakan di Manama - Bahrain. Kegiatan Sidang ditutup dengan kunjungan lapangan Delegasi ke Shusha di daerah Karabakh yang saat ini masih menjadi sengketa antara Azerbaijan dan Armenia.	
5.	**KSI - BKSAP**	Sidang OECD "*On the Road Meeting of the OECD Global Parliamentary Network*" di Riga, Latvia	Delegasi BKSAP DPR RI yang terdiri dari: 1. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc (Ketua BKSAP / Ketua Delegasi) 2. Putu Supadma Rudana, MBA (Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi) 3. Gilang Dhielafararez S.H., LL.M (Wakil Ketua BKSAP/Anggota Delegasi) 4. Irine Yusiana Roba Putri, S. Sos., M.Comn & MediaST (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi) 5. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons). M. Eng.SC. (Anggota BKSAP/Anggota Delegasi) Menghadiri Sidang "*On the Road Meeting of the OECD Global Parliamentary Network*" di Riga, Latvia. Dalam sidang tersebut, Delegasi hadir dalam beberapa sesi, yaitu: 1. "*Governing and Legislating in Digital Age*" 2. "*Combatting Misinformation and Disinformation*" 3. "*Responding to the Challenges of the Digital Transformation in Democratic Process*"	29 Juni – 2 Juli 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Disampaikan komitmen DPR RI dalam menjunjung tinggi transparansi dan aksesibilitas RUU, melawan misinformasi dan disinformasi, serta berkontribusi dalam memperjuangkan kesetaraan HAM dan Gender. Pada sela – sela agenda sidang tersebut, Delegasi BKSAP juga menyerahkan benda seni & kerajinan khas Indonesia seperti Keris, Songket Palembang, Kain Bali dan Gunungan kepada Museum Seni Riga Bourse untuk dipajang sebagai koleksi permanen pada pojok Indonesia.	
6.	**KSB - BKSAP**	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Argentina ke Buenos Aires, Argentina	Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Argentina terdiri dari: 1. H.P. Martin Y. Manurung (F-PNasdem) / Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Argentina 2. Ir. Mindo Sianipar (F-PDIP) / Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Argentina 3. Gde Sumarjaya Linggih (F-PG) / Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Argentina 4. Christina Ariyani, S.E., S.H., M.H. (F-PG) / Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Argentina 5. Siti Mukaromah (F-PKB) / Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Argentina Dalam kunjungan ke Buenos Aires, Argentina GKSB mengadakan pertemuan dengan: 1. *Chamber of Deputies* (Parlemen) Argentina 2. Wamenlu Argentina 3. Dubes RI untuk Argentina	29 Juni – 5 Juli 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pertemuan dengan Parlemen Argentina: Ketua GKSB DPR RI, H.P. Martin Manurung (F-PNasdem) menyampaikan bahwa GKSB DPR RI ini dibentuk khusus untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Argentina dalam semua aspek terutama ekonomi, politik dan perdagangan. Dalam kesempatan tersebut GKSB DPR RI juga menyerahkan undangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua Parlemen Argentina untuk menghadiri acara P-20 pada bulan Oktober yang akan datang. Menjawab pertanyaan delegasi GKSB DPR RI, dikatakan bahwa jumlah anggota parlemen wanita di Argentina sudah mencapai 43% berkat perjuangan kaum wanita lewat UU tahun 2017 yang menetapkan bahwa 30% dari anggota parlemen harus wanita. Dalam diskusi, sekali lagi GKSB DPR RI memohon agar persyaratan permohonan visa ke Argentina dapat diperlonggar agar memudahkan hubungan perdagangan dan pariwisata antar kedua negara. Disampaikan pula bahwa *pluralism* di Argentina tidak pernah terjadi masalah berat yang berhubungan dengan perbedaan pemeluk agama, di Argentina para pemeluk agama yang berbeda hidup bersama dengan harmonis karena sesuai UUD Argentina disebutkan bahwa semua orang yang datang ke Argentina bebas menempati untuk menjadi warga Argentina dan semua bebas memeluk agamanya masing-masing.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Delegasi GKSB DPR RI juga mengundang anggota Parlemen Argentina agar dapat mengunjungi pulau Bali, disamping sebagai pulau tujuan wisata, juga merupakan tempat dimana akan diadakan pertemuan G20. Delegasi juga berkesempatan melihat ruang sidang utama dan gedung-gedung bersejarah Parlemen Argentina. Pertemuan dengan Wamenlu Argentina: GKSB DPR RI - Parlemen Argentina beranggotakan Mindo Sianipar (F-PDIP), GDE Sumarjaya Linggih (F-PG), Christina Aryani (F-PG) dan Siti Mukaromah (F-PKB), dalam kesempatan kunjungan ini Duta Besar dan delegasi membahas hubungan bilateral Indonesia dan Argentina dalam berbagai bidang perdagangan dan kebijakan politik pemerintah Argentina dalam mengatasi tantangan permasalahan ekonomi global. Dalam kesempatan itu disampaikan terobosan yang dilakukan Kedutaan Besar Indonesia di Argentina yang juga mencakup negara Paraguay dan Uruguay dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi setiap WNI di ketiga negara tersebut dengan membuka "warung konsuler", dimana pihak Kedutaan mendatangi negara/wilayah yang selama ini sering terjadi permasalahan. Delegasi juga berkesempatan mendapatkan pendampingan serta masukan terkait *stakeholder* dalam yang akan ditemui di Argentina. Pertemuan tersebut merupakan pembuka dari	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			rangkaian pertemuan dalam agenda kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Argentina. Pertemuan dengan Dubes RI untuk Argentina: Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Argentina menegaskan bahwa maksud dan tujuan kunjungan utama kunjungan ini adalah menyampaikan bahwa GKSB DPR RI ini dibentuk khusus untuk Argentina dengan tujuan utama yaitu meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Argentina dalam semua aspek terutama ekonomi, politik, perdagangan dan pariwisata. GKSB juga menyaampaikan ucapan terima kasih Indonesia kepada Argentina yang selalu mendukung Indonesia dalam berbagai forum internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Argentina juga berterima kasih atas dukungan RI pada forum internasional atas kedaulatan pulau Malvinas, dan menegaskan bahwa Argentina akan partisipasi pada G20 di Indonesia. Terkait *Certificate of Origin* Produk Indonesia, GKSB memohon kepada Argentina untuk memperlunak birokrasi pengesahan produk ekspor Indonesia ke Argentina dan agar Argentina dapat segera menerima *Digital Certificate of Origin*. GKSB juga memohon bantuan Argentina untuk membantu membasmi penyakit mulut dan kuku yang tengah melanda hewan sapi di Indonesia. Menanggapi hal ini Wamenlu tegaskan bahwa penyakit Aftosa ini	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			merupakan penyakit yang sudah ada di Argentina sejak bertahun-tahun lamanya terutama di bagian Utara Argentina dimana berbatasan dengan berbagai negara-negara yang sapi-sapinya mengidap penyakit ini sehingga sangat sulit untuk dicegah, namun Argentina sudah memiliki teknologinya yaitu dengan memberikan vaksin. Kemlu akan membantu menghubungkan Indonesia dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk hal ini. Dibahas pula potensi kerja sama EBT antara kedua negara.	
7.	**KSB - BKSAP**	GKSB DPR RI – Parlemen Korea Selatan menerima Delegasi Korea – Indonesia *Parliamentary Friendship Group* di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III Lt.2	GKSB DPR RI - Parlemen Korea Selatan menerima Delegasi Korea - Indonesia *Parliamentary Friendship Group* di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III Lt. 2 (04/07/2022). Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Korea Selatan, Edward Tannur (F-PKB) berterima kasih atas kehadiran Delegasi Korea - Indonesia *Parliamentary Friendship Group* yang menjadi tindaklanjut dari kunjungan GKSB pada tahun 2021 lalu. Hubungan diplomatik antara Indonesia - Korea Selatan yang akan genap mencapai 50 tahun pada 2023, hendaknya menjadi semangat bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, khususnya di bidang agrikultur, pendidikan, teknologi, infrastruktur dan kerja sama antar parlemen. Ketua GKSB juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk bertukar pikiran dan *best practice* dalam bidang pertanian, dimana Indonesia dapat belajar banyak dari Korea Selatan. Ketua Delegasi Parlemen Korea, Hon.	4 Juli 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Mr. Yun Ho-Jung, menyampaikan bahwa Korea Selatan pernah mengadopsi kebijakan *Green Revolution* yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Korea Selatan, dan sekarang negara tersebut berupaya untuk memodernisasi pertaniannya menjadi *smart farming* dengan mengaplikasikan IT pada sektor tersebut. Hal ini kiranya dapat menjadi potensi kerja sama yang menguntungkan bagi kedua negara. Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Korea Selatan, Effendi Sianipar (F-PDIP) juga menyampaikan ketertarikan Indonesia dalam meningkatkan kerja sama di bidang tenaga kerja, khususnya dalam peningkatan mutu tenaga kerja Indonesia dan pembukaan lapangan kerja. Desy Ratnasari (F-PAN) juga menyatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki potensi besar dalam peningkatan kerja sama pendidikan, yang ditandai ketertarikan pelajar Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi di Korea Selatan. Dalam kesempatan ini GKSB DPR RI - Parlemen Korea Selatan juga mengundang Parlemen Korea Selatan untuk hadir dalam perhelatan P20 yang akan diadakan pada tanggal 6-7 Oktober 2022 di Gedung Nusantara DPR RI.	
8.	**KSI - BKSAP**	*The 4th Meeting of IPU Task Force on Ukraine-Russia Conflict*	Dr. Fadli Zon selaku ketua BKSAP sekaligus *member of IPU Task Force on Ukraine-Russian Conflict* yang mewakili *Asia-Pacific Group* menghadiri rapat terakhir sebelum keberangkatan *Task Force* menuju Kyiv dan Moscow. Pada sisi substansi, Dr. Fadli Zon memberikan intervensi untuk negara yang tidak berkenan hadir di	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Moscow agar tidak perlu mengikuti misi secara keseluruhan untuk menghindari konflik kepentingan. Pada sisi teknis, pihak *IPU* memaparkan *itinerary* misi *Task Force* dari Uni Emirat Arab, Polandia, Ukraina, Polandia, Russia, Polandia, hingga kembali lagi ke Uni Emirat Arab. Selain itu, yang menjadi catatan penting adalah **pihak *IPU* meminta seluruh delegasi untuk tidak mempublikasikan detail perjalanan dan lokasi selama misi berlangsung demi keselamatan dan keamanan mereka. *IPU* juga mengimbau kepada seluruh delegasi untuk membawa uang *cash* dan siap untuk dievakuasi apabila terjadi *emergency* pada saat berada di Kyiv.**	
9.	**KSB - BKSAP**	GKSB DPR RI – Parlemen Kanada mengadakan Rapat Koordinasi dengan Direktur Amerika I Kemlu RI	Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Kanada, Sari Yuliati (F-PG) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Direktur Amerika I Kemlu RI, Iwan Freddy Hari Susanto untuk membahas rencana program kerja GKSB DPR RI - Parlemen Kanada dan isu terkini antara Indonesia - Kanada (05/07/2022). Dalam rapat tersebut dibahas beberapa potensi kerja sama antara Indonesia dan Kanada, seperti Perjanjian dagang Indonesia Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA), Potensi kemitraan Indonesia dan Kanada dalam kerja sama pangan khususnya pada pupuk dan gandum, keamanan siber, perubahan iklim, serta inisiatif ASEAN - Canada Parliamentary Association. ICA - CEPA dapat mendorong nilai ekonomi antara kedua negara, meliputi perdagangan dan investasi serta	5 Juli 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pengurangan tarif pada berbagai produk dan komoditi. Diharapkan ratifikasi dari perjanjian dagang tersebut dapat meningkatkan hubungan ekonomi yg benefisial bagi kedua negara. Direktur Amerika I juga menyampaikan potensi kerja sama pangan antara Indonesia - Kanada, akibat kondisi dunia yang sedang tidak menentu, rantai pasokan pangan dunia yang terkena dampak dari kondisi tersebut mulai mencari sumber pangan yang baru, dimana Indonesia dan Kanada dapat menjadi produsen yang dapat diandalkan. Terkait kerja sama antar parlemen, disampaikan adanya usulan untuk meluncurkan ASEAN - *Canada Parliamentary Association* yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi antara kawasan Asia Tenggara & Kanada. GKSB DPR RI - Parlemen Kanada menyambut baik rencana tersebut. Ketua GKSB juga menyampaikan ketertarikan GKSB DPR RI - Parlemen Kanada untuk bertukar pikiran dalam isu penanganan pandemi dan kerja sama alat kesehatan, keamanan siber dan perubahan iklim, dimana kedua negara memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan mutu untuk menghadapi kedua isu tersebut.	
10.	**KSB - BKSAP**	Wakil Ketua BKSAP DPR RI menghadiri Perayaan 60 Tahun	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez (F-PDIP) menghadiri Perayaan 60 Tahun Hari Kemerdekaan Algeria di Sasono Mulyo *Ballroom*, Le Meridien Hotel, Jakarta (05/07/2022).	5 Juli 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Hari Kemerdekaan Algeria	Wakil Ketua BKSAP disambut oleh Duta Besar Algeria untuk Indonesia, H.E. Mr. Lahcene Kaid Slimane. Diharapkan hubungan kedua negara, termasuk hubungan kerja sama antar parlemen, dapat semakin ditingkatkan.	
11.	**KSI - BKSAP**	Sesi "*Partnership with the Engagement Groups*", G20 *Anti-Corruption Working Group* (ACWG)	Mewakili *engagement group* bidang parlementer, Ka. Biro KSAP menyampaikan isu-isu prioritas P20 yang berkaitan dengan anti-korupsi, serta potensi kolaborasi dengan G20 ACWG. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, pentingnya peran parlemen dalam fungsi pengawasan (khususnya pada proyek-proyek *green economy*), serta legislasi anti-korupsi untuk mendukung sistem pemerintahan yang kuat dalam transisi *net-zero*.	6 Juli 2022
12.	**KSB - BKSAP**	Rapim ke-32 BKSAP DPR RI	Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-32 yang berlangsung secara *hybrid* pada Kamis, 7 Juli 2022. Rapim juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Gilang Dhielafararez, S.H.,LL.M (F-PDIP); Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD); Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Dr. H. Mardani Ali Sera (F-PKS). Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di Masa Persidangan I, khususnya terkait *update* perkembangan persiapan penyelanggaraan P20 pada 6-7 Oktober 2022 termasuk agenda pendukung dari	7 Juli 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			acara tersebut. Dibahas juga berbagai undangan menghadiri sidang Internasional/regional seperti sidang AIPA dan IPU serta APPF. Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara sahabat, perkembangan kunjungan diplomasi dan kunjungan diplomasi perorangan guna memaksimalkan berbagai program kerja BKSAP di masa persidangan mendatang.	
13.	**KSI - BKSAP**	Rapat persiapan kebutuhan materi untuk rangkaian acara P20	Rapat membahas tentang identifikasi kebutuhan materi dan Tenaga Ahli BKSAP yang bertanggung jawab penyusunan materi tersebut dalam rangkaian acara *the Eighth G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)*. Rangkaian acara yang dimaksud antara lain: 1. **Sosialisasi, *Media Feeding* dan *Release*** pada bulan Juli 2022 dengan kebutuhan materi substansi untuk sosialisasi, *media feeding* dan rilis. 2. ***Morning/Afternoon Tea* dengan Dubes negara-negara tamu P20** di Hotel Kempinski pada akhir bulan Agustus 2022 dengan kebutuhan materi sambutan dari ketua DPR, sambutan ketua BKSAP, dan rilis acara. 3. ***Fun Run/Bike*** yang akan diselenggarakan pada 29 Agustus 2022 bersamaan dengan hari Ulang Tahun DPR-RI dengan kebutuhan materi sambutan dari ketua DPR. 4. ***Parliamentary Forum in the context of the G20 Leaders' Summit - 1st Session*** yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 13.30 - 15.00 dengan kebutuhan materi penentuan tema dari 2 isu prioritas, identifikasi	7 Juli 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pembicara, *moderators' note*, *speech*, dan intervensi. 5. ***Parliamentary Forum in the context of the G20 Leaders' Summit – 2nd Session*** yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 15.30 - 17.00 dengan kebutuhan materi penentuan tema dari 2 isu prioritas, identifikasi pembicara, *moderators' note*, *speech*, dan intervensi. 6. ***Opening Session*** pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 13.00-13.30 dengan kebutuhan materi antara lain pidato ketua DPR, *draft* pidato Presiden RI, dan rilis dalam bahasa Indonesia. 7. ***1st Session - Accelerating Sustainable Development and the Green Economy*** pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 13.30-15.30 dengan kebutuhan materi antara lain *moderators' note*, intervensi, dan rilis dalam bahasa Indonesia. 8. ***2nd Session - Emerging Issues: Food and Energy Security, and Economic Challenges*** pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 15.30-17.30 dengan kebutuhan materi antara lain *moderators' note*, intervensi, dan rilis dalam bahasa Indonesia. 9. ***3rd Session - Effective Parliament, Vibrant Democracy*** pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 09.00-10.30 dengan kebutuhan materi antara lain *moderators' note*, intervensi, dan rilis dalam bahasa Indonesia. 10. ***4th Session - Social Inclusion, Gender Equality, and Women Empowerment*** pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 10.30-12.00 dengan	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kebutuhan materi antara lain *moderators' note*, intervensi, dan rilis dalam bahasa Indonesia. 11. ***Closing Session*** pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 12.00-12.30 dengan kebutuhan materi antara lain pidato penutupan ketua DPR dalam dua bahasa dan rilis dalam bahasa Indonesia. 12. ***Launching*** **"Monumen Energi Surya Indonesia" (MESI) DPR** pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 12.30-13.00 dengan kebutuhan materi yakni pidato penutupan ketua DPR dalam dua bahasa.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. **Menteri Keuangan** b. **Gubernur BI**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	1. Realisasi dan perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam semester I dan prognosis semester II TA tahun 2022 **a. Pertumbuhan Ekonomi** • Semester I: 4,9-5,2 persen. • Prognosis sem II: 4,7-5,7 persen • *Outlook*: 4,8-5,4 persen. **b. Inflasi** • S.D Bulan Mei: 3,6 persen • Prognosis sem II: 2,0-4,0 persen. • *Outlook*: 2,0-4,0 **c. Nilai Tukar** • Semester I: Rp14.446 per dolar AS. • Prognosis sem II: • *Outlook*: **d. SBN 10 Tahun** • Semester I: 6,83 persen • Prognosis sem II: 6,27 – 7,17 • *Outlook*: 6,82-8,42 **e. *Lifting* Migas** • Semester I: 605 ribu bpd dan 962 ribu bpd	Rapat kerja dalam rangka Pembahasan Lapsem I dan Prognosis Sem II APBN TA 2022 dilaksanakan pada hari Jumat 1 Juli 2022, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			• Prognosis sem II: 935-703 (minyak) 956-1036 (gas) • *Outlook*: 935-703 (minyak) 956-1036 (gas). **f. ICP** • Semester I: US$ 101,4 per barel • Prognosis sem II: US$ 90-105 per barel • *Outlook*: US$ 90-105 per barel. 2. Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2022 mencapai Rp1.317,2 triliun (58,1 persen dari targetnya dalam Perpres Nomor 98 tahun 2022 atau 71,3 persen dari target APBN Tahun 2022), meningkat 48,5 persen jika dibandingkan realisasi semester I tahun 2021 yaitu sebesar Rp887,0 triliun. Prognosis pendapatan negara dalam semester II tahun 2022 sebesar Rp1.119,7 triliun (49,4 persen terhadap targetnya dalam Perpres Nomor 98 tahun 2022 atau 60,7 persen terhadap target dalam APBN Tahun 2022). 3. Realisasi belanja negara dalam semester I tahun 2022 mencapai Rp1.243,6 triliun (40,0 persen dari Perpres Nomor 98 tahun 2022 atau 45,8 persen dari pagu APBN Tahun 2022). Capaian tersebut meningkat apabila dibandingkan realisasi semester l tahun 2021 yang mencapai	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Rp1.170,2 triliun. Prognosis belanja negara dalam semester II tahun 2022 sebesar Rp1.925,5 triliun (62,0 persen dari pagu Perpres Nomor 98 tahun 2022 atau 70,9 persen dari pagu APBN tahun 2022). 4. Surplus anggaran semester I tahun 2022 mencapai Rp73,6 triliun atau sekitar 0,39 persen terhadap PDB. Prognosis defisit anggaran dalam semester II tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp805,8 triliun atau sekitar 4,32 persen terhadap PDB. Sampai dengan akhir tahun 2022, realisasi defisit diperkirakan sebesar Rp732,2 triliun atau sekitar 3,92 persen terhadap PDB, dan total 5. Realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2022 mencapai Rp153,5 triliun. Prognosis pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2022 sebesar Rp578,7 triliun. Realisasi program PC-PEN pada semester I tahun 2022 sebesar Rp124,5 triliun atau 27,3 persen dari pagunya sebesar Rp455,6 triliun. 6. Realisasi program PC-PEN pada semester I tahun 2022 sebesar Rp124,5 triliun atau 27,3 persen dari pagunya sebesar Rp455,6 triliun.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	a. **Menteri Keuangan** b. **Gubernur BI**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Menyampaikan laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Antara lain: a. Realisasi dan perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam semester I dan prognosis semester II TA tahun 2022. b. Realisasi pendapatan negara semester I dan prognosis semester II tahun 2022. c. Realisasi belanja negara dalam semester I dan prognosis semester II tahun 2022 d. Realisasi surplus anggaran semester I dan prognosis semester II tahun 2022 e. Realisasi pembiayaan anggaran dalam semester I dan prognosis semester II tahun 2022 f. Realisasi program PC-PEN pada semester I tahun 2022. g. Catatan Badan Anggaran DPR RI.	Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Lapsem I dan Prognosis Sem II TA 2022 dilaksanakan pada hari Jumat 1 Juli 2022, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.
3.	a. **Menteri Keuangan** b. **Gubernur BI**	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah.	Rapat Kerja mengesahkan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dengan beberapa catatan dari Badan Anggaran.	Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2022 dilaksanakan pada Jumat, 1 Juli 2022, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	**Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo ke:** 1. **Denpasar, Bali, 27-29 Juni 2022.** 2. **Mataram, NTB, 30 Juni-2 Juli 2022.** 3. **Manado, Sulawesi Utara, 3-6 Juli 2022.**	Peninjauan rumah sakit provider Asuransi Jasindo dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil peninjauan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	**Menghadiri forum komunikasi Badan Kehormatan DPRD se Provinsi Jawa Tengah**	- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan mengahadiri undangan Seminar Nasional dari Badan Kehormatan DPRD Kota Solo.	
2	**Kunjungan Kerja Dalam Negeri**	- Sosialisasi Tugas, Fungsi, Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaran Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI, yang di lakukan di DPRD Kota Depok pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 2 Juli 2022 dan DPRD Provinsi Bali pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 6 Juli 2022.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Melakukan pertemuan dengan : • **Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM);** • **Segenap Civitas Akademi/Narasumber dari UGM.**	Akuntabilitas Keuangan Negara	BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Universitas Gadjah Mada (UGM), di Provinsi Yogyakarta, selanjutnya melakukan pertemuan dengan Rektor dan segenap jajaran civitas akademi UGM dalam rangka mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK tentang Cukai Hasil Tembakau.	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada, tanggal 27 s.d. 29 Juni 2022
2.	Menerima Audiensi : ***Center for Indonesia Strategic Development Initiatives* (CISDI)**	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI menerima Audiensi Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam rangka membahas Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia.	Audiensi di terima pada, tanggal 04 Juli 2022, Pukul 11.00 Wib.
3.	Rapat Kerja dengan : • **Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan**	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala	Rapat Kerja dilaksanakan pada, tanggal 04 Juli 2022, Pukul 13.00 Wib.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI; • **Menteri Linghkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI;** • **Menteri Pertanian RI.**		Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Menteri Linghkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Menteri Pertanian RI, dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.	

*****